

Angkot di Tamansari Bogor Terbakar, Diduga Korsleting

BOGOR (IM) - Satu unit angkutan perkotaan (angkot) yang tengah mengangkut penumpang mengalami kebakaran di Jl Kapten Yusuf, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut.

"Angkot terbakar di Jalan Ciapus (Jl Kapten Yusuf), angkot dari arah Tamansari mau arah Kota Bogor, (yang terbakar) angkot 03 Ciapus-BTM," kata warga bernama Lalan, Rabu (14/12).

Lalan mengatakan angkot itu terbakar saat tengah mengangkut penumpang. Angkot sempat menepi sebelum api berkebar dan menghancurkan bagian belakang dan kursi penumpang angkot.

"Angkotnya lagi angkot penumpang, ada pelajar juga, tapi angkotnya sempat berhenti, jadi penumpangnya sempat keluar semua. Nggak ada, nggak ada yang luka, kan sudah keluar semua penumpangnya," sebut Lalan.

Api yang berkebar di bagian belakang angkot itu diduga terjadi akibat korsleting listrik pada mesin angkot. Warga dan penumpang angkot yang berada di lokasi langsung memadamkan api dengan alat seadanya.

"Kebakaran diduga akibat korsleting listrik, kemungkinan dari kabel-kabelnya. Api sudah dipadamkan sama warga dan ada beberapa penumpang yang ikut padamkan juga, makanya cepat padamnya," kata Kasi Humas Polres Bogor, Iptu Desi Triana ketika dimintai konfirmasi.

Ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian angkot terbakar. Oleh warga dan pemilik, angkot langsung didorong ke tepi jalan dan diderek ke bengkel untuk diperbaiki.

"Alhamdulillah, nggak ada korban. Angkot juga sudah dievakuasi sama warga, dibawa ke bengkel sama yang punya angkotnya," pungkas Desi. ● **gio**

Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Bogor Jadi Prioritas Propemperda 2023

BOGOR (IM) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja dengan Pemerintah Kota Bogor dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, pada Oktober lalu.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Siti Maesarah mengungkapkan dasar dari digelarnya rapat kerja ini adalah terkait harmonisasi pembentukan Perda dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan undang-undang nomor 13 tahun 2022.

"Jadi amanat Undang-undang itu harus ada klastering Perda seperti Undang-undang Cipta Kerja. Sehingga kami mengundang Kemendagri untuk pendalaman materi dan mengharmonisasi Propemperda 2023," ucap Siti Maesarah, dalam keterangannya yang dikutip Rabu (14/12).

Sementara Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti me-

nambahkan, untuk memastikan harmonisasi antara pembentukan Perda dan Undang-undang yang ada, maka Raperda Pajak dan Retribusi Daerah (RPDP) akan menjadi prioritas untuk segera dibahas dan ditetapkan pada 2023.

Sebab, menurut Endah, jika RPDP tidak selesai pada 2023 dan tidak dapat dilaksanakan pada 2024, maka Pemerintah Kota Bogor tidak dapat menarik retribusi pajak yang berakibat tidak adanya pendapatan pada APBD di tahun berikutnya. "Karena di dalam undang-undang maksimum 5 Januari 2024 itu sudah harus berlaku perdanya.

Kalau tidak berlaku perdanya maka tidak bisa menarik retribusi. Artinya ini akan berdampak besar kepada PAD Kota Bogor. Jadi hasil yang pertama adalah adanya kesepakatan bahwa perda RPDP tadi menjadi satu klaster dan menjadi prioritas untuk diselesaikan di 2023," pungkaskannya. ● **jay**

Bawaslu Rapat Koordinasi Wacana Perubahan Dapil



Bawaslu Kabupaten Bogor Rapat Koordinasi Wacana Perubahan Dapil Pemilu Tahun 2024.

BOGOR (IM) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah mengungkap rapat koordinasi dengan sejumlah partai peserta pemilu dan ormas serta wartawan bertujuan untuk memberikan wacana perubahan Daerah Pemilihan (Dapil), di Hotel M-One, Rabu (14/12).

"Isu wacana perubahan Dapil pada pemilu mendatang untuk disosialisasi kepada masyarakat agar memberikan masukan untuk diusulkan ke KPU pusat Jakarta," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah, di hadapan rapat koordinasi untuk memberikan masukan isu perubahan Dapil di Kabupaten Bogor.

Karena itu, ia menekankan kepada peserta rapat koordinasi berjumlah 50 dari unsur partai, ormas dan media bisa memberikan masukan untuk diusulkan ke KPU pusat.

"Usulan atau aspiransi dari partai peserta pemilu, ormas, media, dan masyarakat terkait perubahan Dapil sepenuhnya keputusan KPU pusat," jelasnya.

Sementara, KPU Kabupaten Bogor divisi sosialisasi pemilu, kang Yana panggilan akrabnya, menyebutkan, bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ia menjelaskan, apa itu Dapil daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah Penduduk.

Hal itu, menurutnya, untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota pilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Perubahan itu lanjut kang Yana, harus melalui prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan yakni, kesetaraan suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, coterminus, kohesivitas, integralitas wilayah, dan kesinambungan.

Hal itu juga atas dasar Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 soal pemilu, tentang perubahan Dapil, namun tidak menambah jumlah kursi tetap calon legislatif 55 anggota dewan. Seperti di wilayah Kabupaten Bogor.

Wacana perubahan Dapil di Kabupaten Bogor, sebagian besar peserta rapat tidak menyetujui, dengan dalih selama ini mereka telah berupaya melakukan pendekatan di masing-masing wilayah Dapil. Sudah lama dibina dan pendekatan dengan masyarakat, tentu memerlukan waktu, dana, dan berbagai fasilitas lainnya. ● **gio**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



FESTIVAL DISABILITAS 2022 DI JAWA BARAT

Sejumlah warga disabilitas mengikuti parade saat Festival Disabilitas 2022 di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/12). Festival Disabilitas 2022 yang diikuti oleh berbagai yayasan disabilitas dari berbagai kota di Jawa Barat tersebut diselenggarakan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional.

Sistem *Blacklist* Tidak Berjalan, Bima akan Rombak PBJ Besar-besaran

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku bingung kontraktor yang 'nakal' kembali ikut-ikutan mengerjakan proyek dan hasilnya tetap sama seperti pengerjaan sebelumnya. Tidak tepat waktu dan hasilnya mengecewakan. "Sudah saya minta blacklist kok masih muncul lagi, orang-orangnya. Ya orangnya kan ini-ini juga," tuturnya.

BOGOR (IM)- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto akan melakukan perombakan besar-besaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bogor.

Hal itu dikarenakan sistem blacklist yang tidak berjalan kepada kontraktor yang bermasalah.

Selain itu Bima juga mengaku sudah mengantongi

nama-nama kontraktor yang menjadi sumber persoalan pembangunan di Kota Bogor. "Ya, saya sudah dapat laporan terkait pembangunan dan akan dicek turun ke lapangan terkait proyek yang belum selesai. Seperti Jembatan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan," ungkap Bima, Rabu (14/12).

Bima menjelaskan, untuk

PBJ semua akan digeser secara besar-besaran, kalau tidak akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.

"Saya evaluasi semua, dinas-dinas juga dievaluasi. Kemudian PBJ dievaluasi tentunya. Ini sistem blacklist nya tidak jalan, yang diblacklist harusnya bukan perusahaannya saja tapi orang-orangnya," jelas Bima.

Bima juga mengaku bingung kontraktor yang 'nakal' kembali ikut-ikutan mengerjakan proyek dan hasilnya tetap sama seperti pengerjaan sebelumnya.

Tidak tepat waktu dan hasilnya mengecewakan.

"Sudah saya minta blacklist kok masih muncul lagi, orang-orangnya. Ya orangnya kan ini-ini juga," tuturnya.

Karena itu Bima akan mempelajari anatomi persoalannya seperti apa dan faktanya sistem dan tim PBJ

tidak mampu mendeteksi orang-orang yang bermasalah. Karena itu harus ada pembenahan sistem.

"Saya pelajari dahulu anatomi persoalannya seperti apa. Ya, berarti sistem dan tim PBJ ini tidak mampu untuk mendeteksi orang-orang bermasalah atau sumber persoalan di Kota Bogor. Dalam perusahaannya tidak ada namanya, tapi orangnya itu-itu juga. Ya, jadi harus

ada pembenahan sistem juga," tegasnya.

Bima mengaku, telah mengantongi nama orang-orang yang tidak becus mengerjakan proyek, sehingga kedepannya akan langkah-langkah yang diambil.

"Orang-orangnya sudah saya kantongi nama-namanya. Ada beberapa orang. Nanti kita lihat langkah-langkahnya," pungkaskannya. ● **jay**

Okupansi Hotel di Kota Bandung Capai 90 Persen

BANDUNG (IM) - Okupansi atau tingkat hunian hotel di Kota Bandung menjelang perayaan natal dan tahun baru atau Nataru menyentuh angka 90 persen.

Wisatawan didominasi wilayah Jabodetabek dan mancanegara yang diduga sudah memesan hotel dan akan merayakan Nataru di Kota Bandung.

"Informasi dari beberapa general manager hotel, kenaikannya sudah luar biasa. Okupansinya sudah 90 persen," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Arief Syaifulin, Rabu (14/12).

Dikemukakan Arief Syaifulin, berbagai kegiatan banyak kembali digelar termasuk di sejumlah kafe-kafe dan tempat kuliner lainnya. Namun, pihaknya mengimbau wisatawan tetap menerapkan

protokol kesehatan.

"Yang penting saya berharap, jangan sampai protokol kesehatan ini tidak dilaksanakan dalam rangka menahan Covid-19. Wisatawan harus tetap menjaga prokes. Jangan sampai Covid-19 kembali meningkat karena abai prokes," ucapnya.

Menurut Arief, pihaknya memantau wisatawan yang datang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun, terdapat pula wisatawan dari mancanegara seperti Malaysia, dan Singapura.

"Tentu perayaan nataru tahun ini kita sambut dengan baik, karena ketika banyak wisatawan datang ke Kota Bandung akan berdampak banyak pendapatan. Tetapi detail di lapangan, kita masih menunggu Imendagri yang dilanjutkan dengan Perwal," ujar dia. ● **pur**

Wisuda 350 Hafidz, Pemkab Bogor Cetak Generasi Qurani

BOGOR (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencetak generasi Qurani yang diharapkan mampu membaca dan menghafal Al-Quran secara benar, disertai komitmen untuk mengamalkannya.

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Hadijana melaksanakan Wisuda Tahfidz Al-Qur'an angkatan II tahun 2022 sebanyak 350 hafidz, di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (13/12).

Hadir perwakilan Forkopimda Kabupaten Bogor, perwakilan Lanud Atang Sendjaya, Ketua BAZNAS Kabupaten Bogor, Kementerian Agama Kabupaten Bogor, MUI Kabupaten Bogor, Pimpinan Bank BJB Cabang Cibinong, beserta jajaran Pemkab Bogor.

Aspemkesra Kabupaten Bogor, Hadijana mengatakan, program mulia ini bertujuan mencetak 1.000 orang hafidz Al-Quran untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan Al-Quran serta mengajak masyarakat untuk semangat menghafal, mencintai, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya men-

ciptakan situasi yang kondusif bagi peningkatan dakwah syiar Islam melalui berbagai program kegiatan Karsa Bogor Berkeadaban demi terciptanya kesalehan sosial di masyarakat, serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor, termaju, nyaman dan berkeadaban," kata Hadijana.

Ia mengucapkan selamat dan mengapresiasi kepada 350 peserta yang telah selesai mengikuti proses pembelajaran dan pembinaan tahfidz Al-Quran.

Artinya dari tahun 2021 hingga sekarang kita sudah mewisuda 650 hafidz, semoga tahun 2023 tercapai hingga genap 1.000 hafidz Al-Quran.

"Untuk para pembina hafidz Al-Quran yang telah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang diberikan," tutur Hadijana.

Ia berharap, semoga dengan semakin banyaknya penghafal Al-Quran, diharapkan tercipta generasi Qurani yang mampu membaca dan menghafal Al-Quran secara benar, disertai komitmen untuk mengamalkannya, sehingga kelak menjadi pemimpin-pemimpin adil dan bijaksana, memakmurkan agama dan menyejahterakan umat. ● **gio**

Pemkab Bogor Susun Perencanaan Pra dan Pasca Pilkada Tahun 2024

BOGOR (IM) - Guna mendukung kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Bogor, Pemkab Bogor bersinergi melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pra dan Pasca Pilkada Serentak Tahun 2024.

Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, yang dilaksanakan di Jimmers Montain Resort, Cisarua Kabupaten Bogor, Selasa (13/12).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 telah resmi dimulai sejak 14 Juni 2022.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sedangkan pemilihan serentak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Untuk

itu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seluruh perangkat daerah khususnya dalam meletakkan dasar program/kegiatan, keberlanjutan program dan pembangunan Bupati Bogor definitif di tahun 2025 mendatang," tutur Sekda.

"Saya minta seluruh Kepala Perangkat Daerah terjun langsung mengawal proses awal perencanaan ini, dan mengawal proses koordinasi yang intensif dan efektif antar perangkat daerah selama proses penyusunan dokumen perencanaan. Pastikan program dan kegiatannya mendukung kinerja utama daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Dirinya juga meminta agar Kepala Perangkat Daerah menyiapkan data sektoral, sebab dalam penyusunan perencanaan ini harus berdasarkan kepada data evidin.

"Tahun 2023 merupakan akhir masa jabatan kepala daerah, saya harus tetap mengawal proses pembuatan 7 dokumen perencanaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tahapan ketentuan

peraturan perundang-undangan," tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menambahkan bahwa menyiapkan dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bogor ini penting, untuk itu seluruh perangkat daerah perlu mendapatkan informasi akurat terkait dinamika kebijakan skala nasional yang sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor baik pra maupun pasca Pilkada serentak.

"Melalui kegiatan ini kami ingin membangun sinergi perencanaan dan kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah dalam pra dan pasca Pilkada serentak 2024 nanti. Agar seluruh kepala perangkat daerah, para asisten, para staf ahli, para pejabat fungsional dan termasuk dari para camat juga dihadirkan untuk bersamasama menggali informasi pentingnya terkait kebijakan nasional dalam penyusunan dokumen ini," urainya. ● **gio**



Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin susun rencana Pilkada Bupati/Wakil Bupati Tahun 2024.